

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Sarana pengangkutan laut memegang peranan yang sangat krusial, hal ini penting bukan hanya untuk mendukung kegiatan ekonomi, seperti perdagangan dan distribusi barang, tetapi juga untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan wilayah negara. Pengangkutan laut diperlukan untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain, yang esensial bagi aktivitas ekonomi dan sosial. Selain itu, sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas, pengangkutan laut juga penting untuk menjaga kedaulatan negara, memastikan bahwa wilayah laut tersebut tetap terintegrasi dan terlindungi. Pengangkutan laut memungkinkan distribusi yang efisien dan efektif, mendukung perdagangan internasional, dan memastikan bahwa sumber daya serta kebutuhan pokok dapat mencapai berbagai pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan keberadaan sarana pengangkutan laut yang baik, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonominya secara maksimal, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan memperkuat posisi strategisnya di kancah perdagangan global (Agus, 2021).

Dalam konteks ini, Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya memiliki tugas untuk mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di pelabuhan, mengawasi dan menegakkan hukum terkait keselamatan dan keamanan pelayaran, serta mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang beroperasi secara komersial. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan laut, serta sertifikasi kelaiklautan kapal (Peraturan Menteri RI, 2023). Pelabuhan Tanjung Perak dikategorikan sebagai pelabuhan utama, yang berfungsi untuk melayani kegiatan angkutan laut domestik dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam

jumlah besar, serta sebagai titik asal atau tujuan penumpang atau barang, dan angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi (Undang-Undang RI, 2008).

Oleh karena itu, pengelolaan pelabuhan seperti Tanjung Perak menjadi sangat penting dalam mendukung kegiatan pengangkutan laut yang efisien dan aman, yang pada gilirannya membantu menjaga keutuhan dan kedaulatan negara serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain atau bisa dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Menurut (Purwosutjipto, 2019), pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara penyedia jasa pengangkutan dengan pengirim, di mana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar jasanya. Di Indonesia, pengangkutan menggunakan transportasi laut merupakan suatu alat yang paling efisien yang dapat mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menempuh jarak yang jauh dengan biaya yang relatif murah.

Muatan berbahaya mencakup segala jenis kargo yang memerlukan pengawasan dan penanganan khusus karena sifatnya yang berpotensi membahayakan. Barang-barang ini memiliki karakteristik khusus yang bisa mengancam keselamatan atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Misalnya, bahan kimia beracun, bahan mudah terbakar, atau bahan radioaktif. Barang berbahaya bisa berupa bahan mentah, seperti bahan kimia atau gas, maupun produk jadi, seperti baterai *lithium* atau bahan peledak. Bahan-bahan ini bisa menimbulkan reaksi kimia atau fisik yang berbahaya, seperti ledakan, kebakaran, atau penyebaran zat beracun. Risiko ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan manusia yang berinteraksi langsung dengan barang tersebut, tetapi juga dapat mempengaruhi keselamatan transportasi yang mengangkutnya. Misalnya, jika bahan berbahaya bocor atau meledak saat pengiriman, hal ini bisa menyebabkan kerusakan kapal atau kendaraan pengangkut, serta membahayakan keselamatan awak dan penumpangnya (Hotmanahan & Puspitasari Noviana, 2021).

Selain itu, keberadaan barang berbahaya ini juga berdampak pada lingkungan. Jika terjadi tumpahan atau kebocoran, bahan berbahaya bisa mencemari tanah, air, dan udara, yang dapat merusak ekosistem dan mengancam kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, penanganan dan pengangkutan muatan berbahaya memerlukan prosedur dan peraturan khusus untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mengelola muatan berbahaya secara efektif, diperlukan peraturan dan prosedur yang ketat. Ini termasuk pengemasan yang sesuai, pelabelan yang jelas, serta penyimpanan yang aman. Pengemasan harus dirancang untuk mencegah kebocoran atau kerusakan selama transportasi. Pelabelan yang jelas membantu semua pihak yang terlibat dalam pengangkutan mengenali sifat berbahaya dari muatan tersebut dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan (Ramdani, 2020).

Penanganan muatan berbahaya membutuhkan pelatihan khusus bagi pekerja yang terlibat. Mereka harus mengetahui cara menangani bahan-bahan ini dengan aman, bagaimana merespons keadaan darurat, dan prosedur untuk mengurangi risiko. Pengawasan ketat dan inspeksi rutin juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Pengangkutan muatan berbahaya juga diatur oleh berbagai regulasi internasional dan nasional (Ramdani, 2020).

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha yang menyediakan layanan transportasi laut, meliputi pengangkutan barang dan penumpang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Dalam operasionalnya, perusahaan pelayaran mengoperasikan kapal milik sendiri atau kapal *charter* untuk memastikan muatan tiba di tujuan dengan tepat waktu. Di setiap pelabuhan, perusahaan pelayaran membutuhkan dukungan dari perusahaan pelayaran lain untuk menangani kebutuhan kapal, seperti administrasi pelabuhan, karantina, imigrasi, bea cukai, dan instansi terkait lainnya guna memperlancar proses perijinan dan bongkar muat barang (PUTRI, 2022).

Pelabuhan berfungsi sebagai titik peralihan arus barang dari transportasi laut ke darat dan sebaliknya, yang harus terus berkesinambungan dalam penyediaan

sarana, prasarana, dan layanan bagi kapal. Menurut (UU RI No. 17, 2008), pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu, yang berfungsi sebagai lokasi kegiatan pemerintahan dan ekonomi, tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, serta bongkar muat barang, dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi. Untuk memenuhi kebutuhan kapal, pelabuhan yang layak harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Oleh karena itu, pelabuhan tidak dapat berfungsi secara independen, karena terdiri dari berbagai bagian yang saling mempengaruhi kinerjanya.

Efisiensi dapat dikatakan sebagai proses menghasilkan sesuatu dari sedikitnya pemakaian *input* atau sumber daya tetapi menghasilkan keluaran optimal. Efisiensi bisa diartikan penghematan sumber daya yang digunakan untuk input tetapi dengan hasil yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi didefinisikan sebagai ketepatan dalam melakukan sesuatu dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan benar dan tepat tanpa menghabiskan banyak biaya, waktu, dan tenaga, sedangkan menurut (Berliana, 2020) efisiensi dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seminimal mungkin untuk menghasilkan *output* yang maksimal.

Efisiensi dalam pengangkutan barang berbahaya merupakan aspek kritis dalam operasional logistik dan distribusi, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor ini, seperti PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL). Proses pengangkutan barang berbahaya tidak hanya memerlukan peralatan dan kendaraan khusus, tetapi juga kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan prosedur perijinan yang ketat. Prosedur perijinan ini dirancang untuk memastikan keamanan, baik bagi tenaga kerja yang terlibat maupun lingkungan sekitar. PT. Salam Pacific Indonesia Lines, sebagai salah satu perusahaan terkemuka di bidang jasa angkutan laut di Indonesia, menghadapi banyak tantangan dalam pengangkutan barang berbahaya. Perusahaan ini harus memastikan bahwa semua prosedur perijinan dipenuhi tanpa mengorbankan kecepatan dan efisiensi layanan. Oleh karena itu, penting untuk

menganalisis bagaimana prosedur perijinan saat ini mempengaruhi efisiensi pengangkutan barang berbahaya di perusahaan ini, serta mencari solusi untuk meningkatkan proses tersebut.

Upaya keagenan adalah proses di mana informasi dan data dari pemilik kapal serta kapal itu sendiri disampaikan untuk memberikan berbagai layanan. Proses ini penting karena sesuai dengan ketentuan pelayaran yang berlaku secara internasional, setiap perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal milik sendiri atau kapal sewaan (*charter*) saat menuju pelabuhan tujuan wajib menunjuk perusahaan agen di daerah tujuan tersebut. Tugas dari perusahaan agen ini adalah mengurus semua kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan, termasuk layanan seperti pengisian bahan bakar, penyediaan persediaan makanan dan air, pengaturan dokumen pelayaran, dan koordinasi kegiatan bongkar muat barang. Proses ini dikenal sebagai keagenan.

Prosedur perijinan untuk pengangkutan barang berbahaya merupakan bagian penting dari keseluruhan proses logistik. Prosedur ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengecekan dokumen, inspeksi fisik, hingga pemenuhan berbagai standar keselamatan internasional seperti yang ditetapkan oleh *International Maritime Organization (IMO)*. Meskipun penting untuk memastikan keselamatan, prosedur ini sering kali dianggap sebagai hambatan yang dapat mempengaruhi efisiensi logistik secara keseluruhan. Prosedur perijinan yang kompleks dan birokratis dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, meningkatkan biaya operasional, dan mengurangi fleksibilitas dalam rantai pasok. Di sisi lain, prosedur yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko insiden yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan efisiensi operasional.

Organisasi seperti *International Maritime Organization (IMO)* menetapkan standar untuk pengangkutan barang berbahaya melalui laut, yang dikenal sebagai *International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code*. Di tingkat nasional, undang-undang dan peraturan khusus diberlakukan untuk mengatur transportasi barang berbahaya, yang mencakup aspek-aspek seperti klasifikasi, dokumentasi, dan persyaratan teknis lainnya. Secara keseluruhan, pengelolaan

muatan berbahaya memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk produsen, pengirim, operator transportasi, dan otoritas pengawas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang-barang ini dapat diangkut dengan aman tanpa menimbulkan risiko bagi manusia, makhluk hidup lainnya, maupun lingkungan.

Prosedur perijinan dirancang untuk memastikan bahwa pengangkutan barang berbahaya dilakukan dengan aman dan mematuhi semua regulasi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, prosedur perijinan sering kali menjadi hambatan yang mempengaruhi efisiensi operasional. Proses perijinan yang kompleks dan memakan waktu dapat menyebabkan penundaan pengiriman, meningkatkan biaya operasional, dan menurunkan tingkat kepuasan pelanggan.

Permasalahan yang sering muncul meliputi lamanya waktu pengurusan ijin, kompleksitas persyaratan dokumen, dan kurangnya koordinasi antara berbagai instansi yang berwenang. Kendala-kendala ini dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh prosedur perijinan terhadap efisiensi pengangkutan barang berbahaya di PT. Salam Pacific Indonesia Lines. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi tersebut, perusahaan diharapkan dapat menemukan cara untuk menyederhanakan prosedur perijinan tanpa mengurangi standar keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Pengangkutan barang berbahaya merupakan salah satu aspek kritis dalam industri logistik, terutama bagi perusahaan seperti PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL), yang bergerak dalam pengangkutan laut. Barang berbahaya mencakup berbagai jenis material yang dapat menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan manusia, lingkungan, dan infrastruktur jika tidak ditangani dengan tepat. Karena risiko yang tinggi ini, prosedur perizinan dan operasional pengangkutan barang berbahaya harus dijalankan dengan ketat dan efisien.

Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan kondisi tidak efisien dalam proses pengangkutan barang berbahaya. Kondisi tidak efisien ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas dan panjangnya prosedur perizinan, kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, keterlambatan dalam pengumpulan dan pemrosesan dokumen, serta kurangnya pelatihan yang memadai bagi staf operasional. Akibatnya, proses pengangkutan dapat mengalami penundaan, biaya operasional meningkat, dan risiko kecelakaan atau insiden menjadi lebih tinggi. Kondisi tidak efisien dalam pengangkutan barang berbahaya tidak hanya berdampak pada kelancaran operasional perusahaan tetapi juga dapat merusak reputasi dan menimbulkan sanksi dari pihak berwenang. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab kondisi tidak efisien ini guna memastikan bahwa proses pengangkutan berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan layanan logistik yang efisien dan andal, PT. Salam Pacific Indonesia Lines perlu mengevaluasi dampak dari prosedur perizinan terhadap efisiensi pengangkutan barang berbahaya. Penting untuk memahami bagaimana prosedur perizinan yang ada saat ini mempengaruhi waktu dan biaya pengangkutan, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin ada dalam proses perizinan tersebut. Pada perusahaan PT. Salam Pacific Indonesia lines terdapat permasalahan kurangnya efisiensi pengangkutan barang berbahaya yang disebabkan oleh waktu proses perizinan yang cenderung lama serta kurangnya efisiensi dalam operasional setiap divisi administrasi, oleh sebab itu peneliti mengambil judul **“PENGARUH PROSEDUR PERIJINAN TERHADAP EFISIENSI PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES”** guna menunjang terjadinya peningkatan efisiensi pada proses pengangkutan barang berbahaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengaruh prosedur perizinan terhadap efisiensi pengangkutan barang berbahaya di PT. Salam Pacific Indonesia Lines. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan prosedur perizinan dan

peningkatan efisiensi operasional perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan yang berlaku. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi industri logistik di Indonesia dalam menghadapi tantangan yang serupa, serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung efisiensi tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

## **1.2 Batasan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan agar tidak keluar dari judul yang sudah ditetapkan, maka peneliti hanya membahas masalah prosedur perijinan terhadap efisiensi pengangkutan barang berbahaya di PT. Salam Pacific Indonesia Lines.

## **1.3 Rumusan masalah**

Berikut rumusan masalah dalam prosedur perijinan pengangkutan barang berbahaya:

1. Bagaimana pengaruh prosedur perijinan terhadap efisiensi pengangkutan barang berbahaya di PT. Salam Pacific Indonesia Lines?
2. Apa saja faktor-faktor dalam prosedur perijinan yang berdampak pada efisiensi pengangkutan barang berbahaya di PT. Salam Pacific Indonesia Lines?

## **1.4 Tujuan**

1. Untuk mengetahui pengaruh prosedur perijinan terhadap efisiensi pengangkutan barang berbahaya di PT. Salam Pacific Indonesia Lines
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dalam prosedur perijinan yang berdampak pada efisiensi pengangkutan barang berbahaya di PT. Salam Pacific Indonesia Lines.

## **1.5 Manfaat penelitian**

### **1.5.1 Manfaat teoritis**

- a. Studi kasus ini dapat digunakan dalam program studi terkait seperti manajemen logistik, manajemen operasi, hukum bisnis, dan teknik industri. Materi ini dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana

prosedur perijinan mempengaruhi efisiensi operasional dalam sektor transportasi.

- b. Penelitian ini menambah jumlah penelitian sebelumnya tentang manajemen logistik dan pengangkutan barang berbahaya. Ini dapat digunakan sebagai referensi untuk dosen dan mahasiswa saat melakukan penelitian lebih lanjut atau untuk tugas akhir dan disertasi.
- c. penelitian ini membantu dosen dan mahasiswa memahami kompleksitas peraturan dan proses perijinan di industri transportasi. Dengan pemahaman ini, mereka dapat lebih baik dalam analisis kebijakan, perencanaan logistik, dan manajemen risiko.

#### **1.5.2 Manfaat praktis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan saran praktis tentang cara mengoptimalkan proses perijinan di PT SPIL, yang dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan barang berbahaya, yang dapat mencakup pengurangan waktu tunggu, biaya, dan kecepatan pengiriman.
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dengan memahami dampak dari proses perijinan. Ini tidak hanya mengurangi risiko hukum tetapi juga meningkatkan keselamatan pengangkutan barang berbahaya, yang berarti lebih sedikit kemungkinan insiden atau kecelakaan.
- c. Penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen PT SPIL untuk membuat kebijakan internal tentang pengangkutan barang berbahaya dan prosedur perijinan yang lebih sesuai dengan best practices dan peraturan terbaru.